

Polda Jateng Tegaskan Larangan Menyulut Petasan



KR-Karyono
Kombes Pol M Iqbal Alqudusy

SEMARANG (KR) - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi melalui Kabid Humas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Senin (26/12) menegaskan tentang larangan menyulut petasan (mercon) guna menyambut pergantian tahun, dari Tahun 2022 menuju Tahun 2023. Disampaikan, pelarangan menyulut petasan yang termasuk bahan peledak bukan tidak beralasan. Hal itu sesuai Undang-undang Darurat Tahun 1951 serta sejumlah aturan lainnya. "Meledakkan atau membakar petasan tidak diizinkan," tandasnya.

Menurut Iqbal keberadaan mercon sangat berbahaya. Tidak sedikit kasus terkait ledakan petasan. Banyaknya korban tewas maupun luka berjatuh akibat petasan, baik itu anak-anak maupun dewasa. Selain itu ada rumah yang ludes gara-gara ledakan petasan. Oleh karena itu petasan dilarang karena dampaknya yang berbahaya. Meski demikian, Iqbal menyebut masyarakat diperbolehkan menyalakan kembang api atau bunga api saat merayakan Malam Tahun Baru, tentu dengan persyaratan tertentu.

"Penggunaan kembang api dalam skala besar harus ada izin. Perusahaan atau kelompok masyarakat yang ingin menyalakan kembang api saat Malam Tahun Baru, silakan mengurus perizinannya. Untuk informasi lengkap silakan hubungi Satuan Intelkam di polres terdekat," tambahnya. Iqbal menyampaikan, Polda Jateng dan jajaran akan all out mengamankan perayaan Malam Tahun Baru. Polisi akan memonitor setiap kegiatan masyarakat, melakukan penjagaan dan patroli untuk menjaga kenyamanan warga pada malam tahun baru

"Sudah disiapkan pos-pos pengamanan Nataru. Namun khusus tahun baru nanti, dipastikan seluruh personel Polri Polda Jateng akan diterjunkan ke lapangan," tegasnya. Iqbal mengimbau masyarakat bersikap bijak serta mempertimbangkan banyak faktor sebelum ke luar rumah untuk merayakan pergantian tahun. Hindari arak-arakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun pengendara lainnya, Apalagi saat ini sering turun hujan. Harus diperhatikan faktor kesehatan serta keselamatan sebelum bepergian. **(Cry)-f**

DIPULANGKAN PEMPROV JATENG Wisatawan Tertahan di Karimunjawa

SEMARANG (KR) - Pemprov Jateng bersama Dirjen Perhubungan Laut dan Pemkab Jepara memulangkan 315 wisatawan yang tertahan di Karimunjawa, akibat cuaca buruk, Selasa (27/12). Direncanakan, pemulangan ratusan pelancong itu menggunakan kapal milik Pelni KM Kelimutu, yang akan berlabuh di Dermaga Legon Bajak sekitar pukul 17.00 WIB.

Demikian dikatakan Plt Kepala Dishub Jateng Syurya Deta Syafrie, Selasa (27/12). Komunikasi telah terjalin antara Pemprov Jateng, Pemkab Jepara dan Kementerian Perhubungan. "Kita mohon agar dilakukan deviasi Kapal Kellimutu yang harusnya dari Kumai langsung ke Semarang, dideviaskan (berbelok) singgah di Legon Bajak Karimunjawa pada 27 Desember dan akan mengangkut wisatawan," tutur Syurya Deta.

Menurut Syurya, kapal direncanakan singgah ke Dermaga Legon Bajak pada pukul 17.00. Namun, wisatawan diharapkan sudah berkumpul pada pukul 15.00 di pelabuhan, agar pada sekitar pukul 18.00 kapal dapat berlayar kembali. Menurut Deta, saat ini wisatawan dalam kondisi baik. Ini karena telah ada sinergi dari pihak terkait terkait logistik, kesehatan hingga penginapan.

Dishub Jateng juga melakukan komunikasi dengan pemerintah desa Karimunjawa, terkait suplai logistik. Dari komunikasi tersebut diinfokan tidak ada hal mende-sak dan perlu dikhawatirkan. Pasokan pangan dan energi aman semua. Deta mengimbau agar wisatawan dan pengelola perjalanan wisata lebih memerhatikan situasi cuaca di perairan Karimunjawa.

"Kita sudah mengetahui pola cuaca di Karimunjawa, misal Desember-Januari polanya ada angin barat yang sebabkan angin dan ombak tinggi. Kami harap biro wisata dan pelaku wisata memahami serta memberi sosialisasi terkait pola perjalanan wisata di Karimunjawa yang paling bagus pada April-Oktober. Ini sebagai pembela-jaran yang baik," ujar Syurya **(Bdi)-f**

Wapres Resmikan Enam PLUT KUMKM

SEMARANG (KR) - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia secara serentak yang dipusatkan di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang Selasa, (27/12). Enam PLUT KUMKM yang diresmikan tersebut, PLUIT KUMKM Kabupaten Purwo-rejo, Buleleng, Dairi, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dan Kota Kendari.

Didampingi Menteri Koperasi dan UKM (MenKop-UKM) Teten Masduki, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, serta 5 Bupati dan 1 Walikota tempat PLUT didirikan, Wapres mengatakan, pemerintah terus menghadirkan transformasi ekonomi yang inklusif dan menjangkau semua lapisan tingkatan ekonomi. Transformasi ini hanya bisa dicapai dengan tiga pilar, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan kerja, yang salah satunya dengan kehadiran PLUT KUMKM.

"Saya sangat senang karena kehadiran layanan terpadu ini diharapkan menjadi akselerator tumbuh kembang koperasi, UMKM dan wirasaha yang selama ini ikut menggerakkan ekonomi," kata Maifuruf Amin. PLUT menurut Wapres memiliki posisi strategis sebagai pengembang semangat kewirausahaan, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan. PLUT KUMKM dinyatakan sebagai salah satu Executing Agency Pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah.

Sementara Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, PLUT KUMKM saat ini merupakan perwujudan rumah UMKM yang menjadi alat pemerintah untuk mempercepat pencapaian target sebagaimana amanat dalam RPJMN maupun kebijakan yang terkait dengan transformasi ekonomi nasional. **(Sus)-f**

Pengumpulan Bulan Dana PMI Lebih Target

MAGELANG (KR) - Pada Malam Tahun Baru di tengah Kota Magelang tidak ada pengalihan atau penutupan arus lalu lintas di jalan-jalan tertentu. Namun nantinya di sekitar Alun-alun Kota Magelang akan disterilkan tempat parkir kendaraan. Tujuannya, untuk kenyamanan masyarakat. Di Alun-alun Kota Magelang kemungkinan tidak ada kegiatan yang signifikan.

Demikian dikemukakan Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda E Sebayang SIK MM kepada wartawan usai acara serah terima hasil penggalangan dana Bulan Dana PMI Kota Magelang Tahun 2022 di Pendapa Pengabdian rumah dinas Walikota Magelang, Selasa (27/12). Dikatakan, hingga Selasa yang izin resmi menyelenggarakan kembang api pada malam pergantian tahun baru 1 hotel.

Di Alun-alun Kota Magelang nantinya akan ada atraksi dancing fountain saat malam pergantian tahun. Karena itu di sekitar Alun-alun Kota Magelang akan clear park atau bersih dari parkir kendaraan bermotor, sehingga masyarakat leluasa berada di Alun-alun Kota Magelang. Untuk parkir kendaraan, nantinya akan disiapkan di beberapa kantong parkir. Mengenai pelaksanaan Bulan Dana PMI Kota Magelang Tahun 2022, Kapolres Magelang Kota yang juga Ketua Pelaksana Bulan Dana PMI Kota Magelang Tahun 2022 mengatakan mulai kerja penggalangan dana sekitar Bulan Oktober-November 2022. Hal itu berkaitan dengan cara menggiatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi untuk membantu orang lain.

Demikian juga bagaimana menggerakkan hati nurani anak-anak yang banyak memberikan bantuan, baik yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP dan SMA. Di tahun ini tidak banyak menggunakan sistem kupon, tetapi penyampaian saja.

Untuk yang sistem kupon, justru lebih banyak beredar di unit-unit layanan masyarakat. Dalam kegiatan Bulan Dana PMI Kota Magelang 2022 diberi jeda waktu 3 bulan, dan berhasil terkumpul dana Rp 699.000.000,-. Jumlah ini melebihi jumlah yang ditargetkan sebelumnya.

Mengenai banyaknya antusias masyarakat Kota Magelang dalam kegiatan Bulan Dana PMI Kota Magelang Tahun 2022 ini, Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH secara terpisah kepada wartawan mengatakan hal itu menunjukkan kalau masyarakat Magelang suka berderma untuk membantu kemanusiaan, baik di Kota Magelang maupun sekitarnya.

Beberapa waktu lalu juga sudah disalurkan bantuan ke beberapa lokasi berkaitan dengan bencana alam, dan sudah dibawa PMI sendiri maupun BPBD Kota Magelang.



KR-Thoha

Kapolres Magelang Kota, selaku Ketua Bulan Dana PMI Kota Magelang Tahun 2022, secara simbolis menyerahkan hasil penggalangan selama Bulan Dana PMI Kota Magelang Tahun 2022 kepada Walikota Magelang.

SEJUMLAH PROYEK TERKESAN AMBURADUL
Bupati Tuding Kontraktor Tidak Profesional

REMBANG (KR) - Hingga menjelang tutup tahun 2022 ini masih banyak proyek fisik di wilayah Kabupaten Rembang yang amburadul. Bahkan diperkirakan ada sejumlah proyek fisik yang terancam tidak bisa merampungkan pekerjaan. Proyek pelebaran dan peningkatan di sejumlah ruas jalan hingga kini masih amburadul.

"Proyek dikerjakan di bulan November, hujan terus menerus, sehingga tepi jalan yang dikeruk menjadi penuh air. Ini tentu sangat menghambat dan kualitas pelebaran jalan tidak optimal," kata Ir Winarto, pengamat pembangunan tata kota kepada , Selasa (27/12) kemarin.

Disamping pelebaran di sejumlah ruas jalan tengah kota, juga tengah dikerjakan proyek taman kota yang juga ditengarai menyalahi rencana anggaran belanja (RAB). Beberapa tim pemeriksa saat ini tengah turun ke lapangan,dan informasinya sudah mendapat banyak catatan sejumlah proyek yang amburadul.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Rembang Gantiarto mengatakan hal itu menunjukkan bahwa proyek yang dikerjakan oleh kontraktor tidak profesional.

"Banyak diantara pemenang tender tidak punya modal dan hanya mengandalkan uang dari pemerintah daerah. Jujur saya juga kecewa," kata Abdul Hafid. **(Ags)-f**

Kenaikan Harga Beras Harus Diantisipasi

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terus memantau beberapa komoditas pangan penyumbang inflasi menjelang pergantian tahun baru 2023.

Ganjar Pranowo mengatakan, beras menjadi salah satu komoditas yang diperhatikan pasokan dan kebutuhannya di Jateng.

Hal tersebut dikatakan Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang, Selasa (27/12). Saat ini di Jateng, logistik termasuk pangan, dari hasil evaluasi masih bagus. Beberapa komoditas pangan memang harganya masih naik turun.

"Kontrol terhadap harga pangan atau kebutuhan pokok menjelang tahun baru tidak boleh berhenti sampai dengan nanti tahun baru. Saya berharap suplai pangan dan kebutuhan pokok lain di Jawa Tengah cukup dan harga relatif terkendali, sehingga secara keseluruhan pasti terkendali," tutur Ganjar.

Ganjar mengatakan, saat mengikuti Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah terpusat dipimpin Mendagri Tito Karnavian Senin (26/12), diinformasikan komoditas seperti beras, telur ayam ras, cabai rawit dan cabai merah jadi penyumbang inflasi di sejumlah daerah.

Produk beberapa jenis pertanian belum ada panen. Kondisi tersebut yang memicu terjadinya fluktuasi harga. Untuk itu harus ada produk substitusinya.

Kalau harga cabe bergerak naik tajam, masyarakat bisa mengonsumsi cabe olahannya, tidak harus fresh. Terkait beras, Ganjar mengatakan di Jawa Tengah saat ini ketersediaannya aman.

Soal impor beras yang sudah masuk, Ganjar meminta agar dikontrol dengan baik. Gubernur mengatakan tidak masalah jika Jateng tidak masuk dalam daftar daerah penerima jatah impor beras tersebut.

"Jateng tidak perlu ada beras impor. Kemarin Sragen yang menyampaikan kepada saya, para pedagang beras pada protes, karena di Sragen juga lumbung beras. Saya minta tolong ditahan. Beras impor bisa dimasukkan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan," tegas Ganjar.

Sebagai informasi, dari data Badan Pusat Statistik mengatakan menjelang akhir tahun 2023 sejumlah komoditas strategis mengalami kenaikan harga. Antara lain telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah dan beras.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto membeberkan, kenaikan harga komoditas strategis tersebut rata-rata di angka Rp 30.000-Rp 50.000/kg. Untuk beras secara kumulatif selama Desember peningkatannya 2,2 persen. Rata-rata harganya Rp 11.000/kg. **(Bdi)-f**

Disusun RPD Temanggung Tahun 2024 -2026

TEMANGGUNG (KR) - Pemerintah Kabupaten Temanggung menyusun rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, sebab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 berakhir Desember 2023, sementara pemilihan kepala daerah serentak pada 24 November 2024.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan penyusunan RKPD 2024-2026 untuk memastikan kelangsungan pembangunan daerah sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022. "Inmendagri tersebut berisi tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru," kata Al Khadziq, Senin (26/12).

Dikemukakan pada peraturan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2023 untuk segera menyusun dokumen RPD yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi hingga dilantik bupati dan wakil bupati hasil pilkada serentak. Khadziq mengatakan secara prinsip rancangan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 mengacu pada tahapan skala prioritas pembangunan daerah periode keempat RKJPD Kabupaten Temanggung 2005-2925.

Disebutkan prioritas pembangunan dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, yakni jalan jembatan, pembangunan kawasan perkotaan, trotoar, pasar daerah menyangkut keindahan kota. Kemudian lingkungan hidup, tentang konservasi, persampahan, dan tanggung jawab dunia industri dalam menjaga lingkungan. Pertanian mandiri, yakni masyarakat memiliki ekonomi berbasis pertanian yang kuat, baik sayuran, kopi atau pertanian alternatif lainnya berupa pemanfaatan teknologi pemanfaatan lahan pertanian juga sangat penting. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto mengatakan kelangsungan pembangunan harus terjadi maka itu di antaranya dengan penyusunan RPD.

"RPD harapannya bisa meneruskan pembangunan, jangan sampai ada kemandegan pembangunan," katanya. Yunianto mengatakan DPRD turut dalam pembahasan RPD yang harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan terus berjalan. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Dwi Sukarme mengatakan selain konsultasi publik rancangan RPD, dalam kegiatan ini juga dilakukan konsultasi publik RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Dwi Sukarme mengatakan maksud penyelenggaraan konsultasi publik ini sebagai forum untuk menampung aspirasi. **(Osy)-f**

Pemilik Tanah di Tapak Bendungan Bener Terima UGR

PURWOREJO (KR) - Puluhan warga pemilik 25 bidang tanah terdampak Bendungan Bener di lokasi tapak bendungan, Desa Guntur Kecamatan Bener, terima uang ganti rugi (UGR), Senin (26/12). Penerima ganti rugi itu adalah bagian dari warga pemilik 176 bidang yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Warga penerima UGR diundang ke BRI Cabang Purworejo untuk menandatangani berkas dan menerima buku rekening berisi dana. Pemerintah membayarkan UGR senilai kurang lebih Rp 1,7 miliar.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo Andri Kristanto mengatakan, besaran UGR yang diterima warga bervariasi. Nilai terbesar kurang lebih Rp 260 juta, sedangkan terkecil Rp 97.000. "Memang ada yang dapat Rp 97.000, karena tanah yang kena hanya satu meter persegi," ungkapnya.

Menurutnya, puluhan warga tersebut menerima UGR setelah mereka menyatakan kesediaannya. Tim pengadaan tanah berkoordinasi untuk melakukan pembayaran terhadap lahan tersebut. Sementara untuk 151 bidang lainnya, kata Andri, masih menunggu proses hukum yang berjalan di MA. "Untuk lainnya belum karena menunggu proses PK. Kami berharap warga yang memang sudah bersedia, bisa menghubungi tim pengadaan tanah untuk menerima UGR," tuturnya.

Dikatakan, ganti rugi yang diberikan kepada

warga mengalami kenaikan dari besaran penilaian yang dilakukan tim appraisal. Nilai ganti rugi per meter naik dari kurang lebih Rp 60.000 per meter persegi menjadi Rp 90.000-Rp 100.000 per meter persegi. "Kebijakan pemerintah adalah menaikkan harga per meternya karena adanya masa tunggu. Nilai itu sudah mendekati nilai ganti rugi yang terbaru," paparnya.

Ketua Paguyuban Masyarakat Tradampak Bendungan Bener (Masterbend) Eko Siswoyo membenarkan ada sebagian warga yang awalnya ikut mengajukan gugatan PMH, kini mau menerima UGR.

"Saya kira itu adalah hak masyarakat, tidak jadi soal bagi paguyuban, dan kami tentunya tidak akan menghalang-halangi," ujarnya.

Menurutnya, adanya



KR-Jarot Sarwosambodo

Warga Desa Guntur terima UGR.